

KOMISI III DPR RI

Analisis

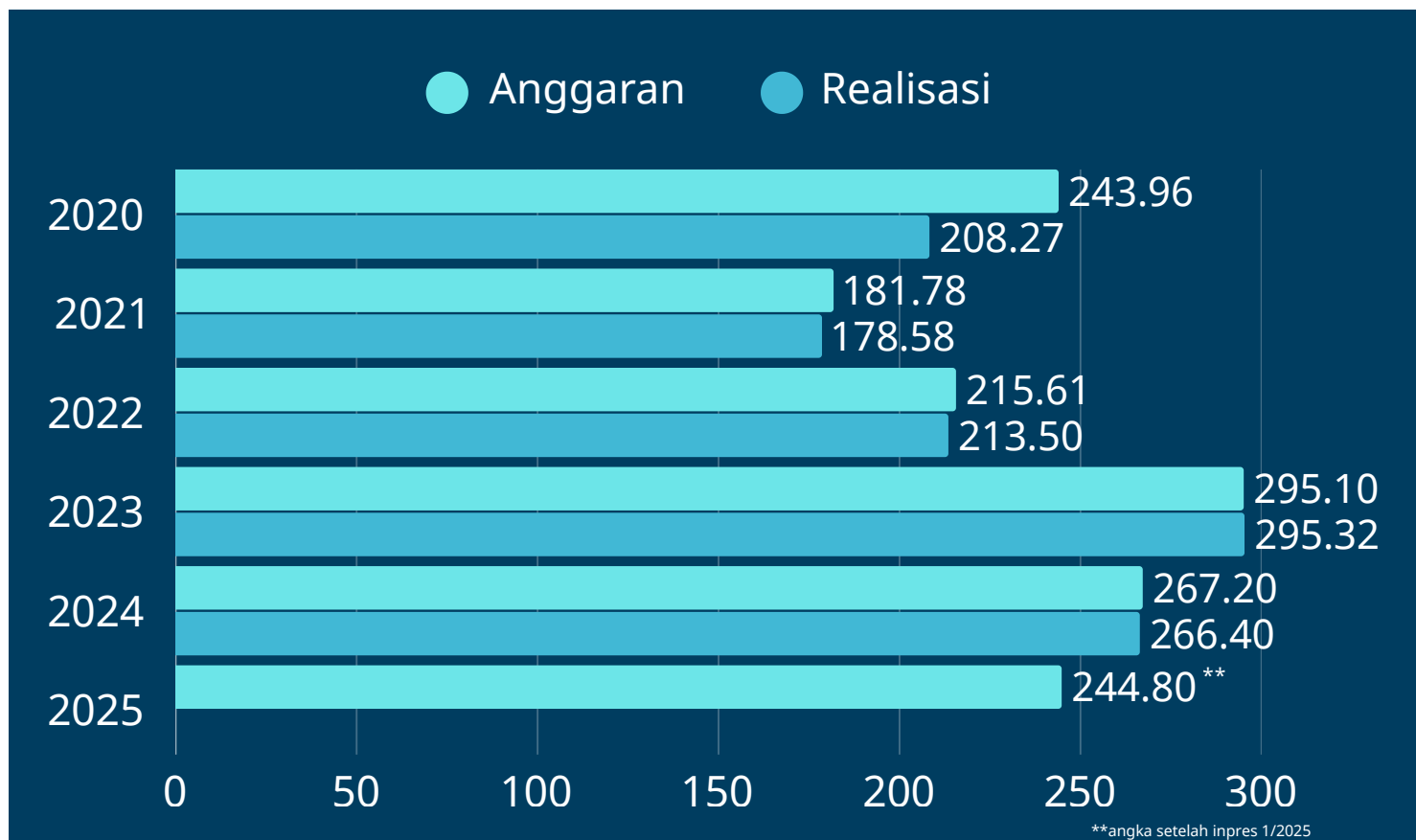
PAGU ANGGARAN

2025

Pagu Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

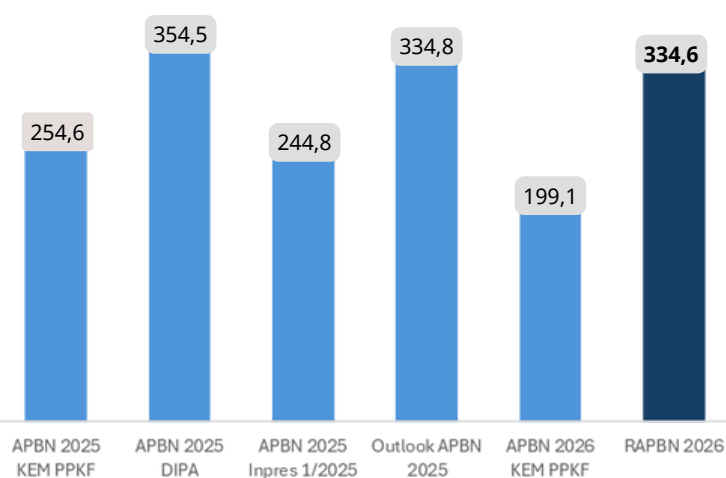
Kinerja Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di tengah kendala keterbatasan belanja pegawai yang berulang

Dinamika Anggaran PPATK RI 2020 - 2025 (dalam miliar rupiah)



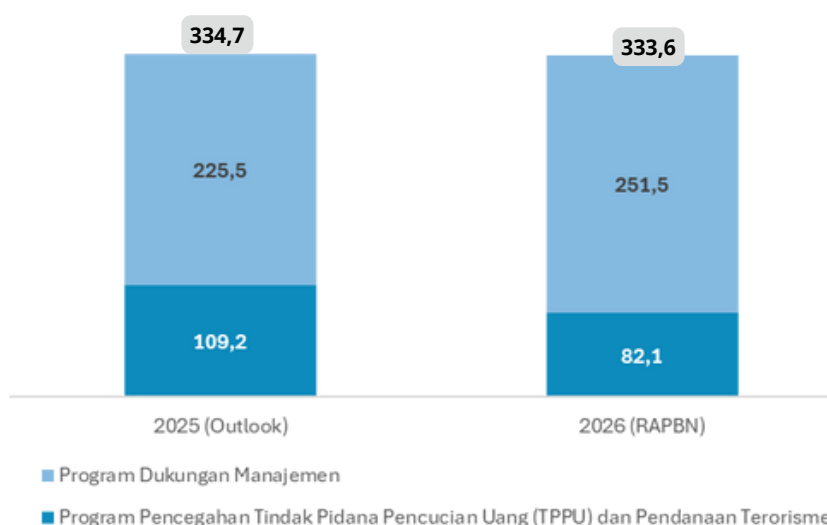
Sumber: LHP atas LK PPATK 2020-2023, LRA PPATK 2024, NK APBN 2025, Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026, NK APBN 2026.

Dinamika Besaran Alokasi PPATK RI 2025 - 2026 (dalam miliar rupiah)



Sumber: NK APBN 2025, Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026, NK APBN 2026.

Perbandingan Alokasi PPATK RI 2025 - 2026 (dalam miliar rupiah)



Sumber: NK APBN 2026.

→ Overview Pagu Anggaran 2026

Pagu Anggaran PPATK 2026 berdasarkan Nota Keuangan 2026 adalah sebesar **Rp333,6 miliar**, dengan alokasi Program Dukungan Manajemen Rp251,5 miliar, serta Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Rp 82,1 miliar.

Nilai tersebut secara total turun tipis sebesar 0,3 persen jika dibanding *Outlook* APBN 2025 yang sebesar Rp334,7 miliar. Namun, jika diukur dari besaran pagu indikatif 2026 yang diberikan sebesar Rp199,1 miliar, terdapat kenaikan alokasi yang cukup signifikan mencapai 68%. Selain itu, jika tidak ada perubahan signifikan, alokasi anggaran PPATK 2026 juga menjadi salah satu yang terbesar dalam 6 tahun terakhir, mengindikasikan arah kebijakan Pemerintah yang semakin mendukung kebijakan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme di Indonesia

→ Proporsi Terbesar Anggaran PPATK RI Dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen mendominasi struktur anggaran PPATK berkisar antara 65 - 80%. Proporsi tersebut berfluktuasi namun menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan pagu anggaran 2026, proporsi Program Dukungan Manajemen mencapai 75%, naik dari *outlook* 2025 yang sebesar 67%. Meskipun demikian, struktur ini jauh **menunjukkan perbaikan** jika dibandingkan struktur pagu indikatif yang terdiri dari 100% dukungan manajemen tidak lepas dari penurunan alokasi yang diberikan.

→ Overview Rencana Kerja 2026

PPATK dalam Rencana Kerjanya di tahun 2026 mengangkat tema “Penguatan Implementasi Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, TPPT, Dan PPSPM, Optimalisasi Penelusuran Aset Hasil Kejahatan Di Bidang Korupsi, Narkotika, Judi, dan Lingkungan Hidup Secara Inklusif dan Berkelanjutan” yang mendukung pencapaian visi Asta Cita 7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyelundupan”.

Terdapat 4 Program Prioritas dalam Rencana Kerja PPATK 2026, yaitu:

1. Pemenuhan Kewajiban dan Penguatan sebagai Anggota FATF melalui Penguatan Implementasi Strategi Nasional;
2. Optimalisasi Pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan yang mendukung Program Asta Cita;
3. Perluasan dan Peningkatan Kualitas Pelaporan dari Pihak Pelapor;
4. Modernisasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi (TI).

→ Highlight Pencapaian 2024

Berdasarkan Laporan Tahunan PPATK, PPATK selama tahun 2024 telah menerima 36.650.984 laporan, yang terdiri atas Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) sebanyak 31.681.659 laporan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebanyak 3.690.362, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak 136.546, Laporan Transaksi oleh Penyedia Barang/Jasa (LTPBJ) sebanyak 131.193, Laporan Penggunaan Uang Tunai (LPUT) sebanyak 8.795, dan Laporan Transaksi (LPT) sebanyak 2.429. Angka tersebut naik 4,3% dari laporan yang diterima di tahun sebelumnya menandakan kenaikan produktivitas PPATK. Di tahun 2025, hingga Semester I atau Bulan Juni, laporan yang diterima PPATK sudah mencapai 21.181.572 laporan atau 58% dari capaian 2024.

Dalam upaya penegakkan hukum, di tahun 2024 nominal transaksi yang diidentifikasi sebagai transaksi terkait dugaan tindak pidana asal seluruhnya sebesar **Rp1.459triliun** yang mana nominal transaksi terkait **dugaan tindak pidana korupsi** memiliki nilai terbesar (**Rp984triliun**), diikuti dugaan **tindak pidana di bidang perpajakan (Rp301triliun)** dan **perjudian (Rp68triliun)**

Di samping itu pada 2024 terdapat 4 Hasil Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana yang ditindaklanjuti melalui penegakan hukum dan perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas 4 perkara tersebut, ada **tambahan penerimaan negara** melalui **pembayaran denda** sebesar **Rp7.3miliar** dan **uang pengganti** sebesar **Rp63.31miliar dan USD30.000**, serta sejumlah aset berupa tanah, bangunan dan kendaraan bermotor. PPATK juga berperan aktif dalam upaya pengembalian uang negara melalui Satgas BLBI.

Terkait aktivitas perjudian *online*, PPATK di 2024 mengidentifikasi Total Perputaran Dana Aktivitas Perjudian Online mencapai Rp359.8 triliun dari 209,57 juta transaksi dan 16,28 juta pemain. Terkait hal tersebut beberapa upaya yang dilakukan di antaranya **penghentian sementara transaksi** pada 15.181 rekening dengan nominal henti sementara Rp626miliar.

→ Catatan terkait Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan bahan PPATK pada Rapat Kerja dengan Komisi III Bulan Juli 2025, Berdasarkan proyeksi perhitungan yang dilakukan PPATK, alokasi yang tersedia hanya sanggup memenuhi kebutuhan belanja pegawai sampai dengan bulan Agustus 2025. Fenomena kekurangan belanja pegawai **telah terjadi sejak 2018** sehingga setiap tahunnya PPATK menyampaikan usulan tambahan anggaran belanja pegawai **melalui mekanisme BA BUN** pada tahun berjalan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat juga pernah diangkat menjadi salah satu temuan dalam LHP BPK atas LK PPATK 2023 terkait Pergeseran Mata Anggaran Kegiatan Belanja Pegawai Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kekurangan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp397.842.500,00 dari realisasi Belanja Pegawai yang melebihi anggarannya.

Pengarah

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA, POIA

Penulis

Fachry Ali Firdaus, S.E.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Tio Riyono, S.E.



Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id**